



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Juni 2020

Halaman: 5

BANTUAN SOSIAL

DTKS Perlu Diverifikasi Kembali

DANUREJAN—Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan Pemda DIY memiliki masalah validitas. Karena itu, Kemensos memverifikasi kembali DTKS.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan Pemda DIY melakukan *top up* pada Program Keluarga Harapan (PKH), sembako reguler dan sembako perluasan.

"Setelah dilakukan *cleansing*, ketiga program itu ternyata banyak data yang terduplikasi, ada yang sudah meninggal dan sebagainya," ujarnya dalam video konferensi bersama KPK dan sejumlah gubernur lainnya, Rabu (24/6).

Dari pengalaman tersebut, Pemda meminta DTKS direvisi kembali agar lebih valid dan meminimalisir salah sasaran. Sultan melihat DTKS selalu bertambah dan tidak pernah berkurang padahal ada penduduk dalam data itu yang meninggal atau sudah tidak miskin lagi, sehingga semestinya ada pengurangan.

Sekretaris Daerah DIY Kadamanta Baskara Aji menuturkan beberapa kesalahan dalam DTKS di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai lebih dari satu nama, NIK tidak masuk kartu keluarga (KK) dan lainnya.

Setelah dilakukan *cleansing*, sudah tidak terjadi *double data* antar sesama penerima program

Beberapa kesalahan dalam DTKS di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai lebih dari satu nama.

Model *cleansing* di DIY bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

top up dari Pemda DIY. *Double data* terjadi dengan penerimaan program lain seperti program dana desa atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada kasus seperti ini, penerima tidak bisa menerima bansos dari Pemda DIY karena harus menandatangani surat pernyataan hanya menerima satu program. Jika melihat data Ombudsman RI perwakilan DIY, terdapat 39 warga yang mengadu soal pelaksanaan bansos, ketika mereka merasa berhak namun tidak terdaftar sebagai penerima.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan terkait dengan ketidakvalidan DTKS, pemerintah sudah menggelar perbaikan sejak 1,5 tahun terakhir. Perlu menjadi catatan yakni sekarang terjadi mutasi identitas pada sebanyak satu juta penduduk Indonesia. Dalam perbaikan DTKS, pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Proses *cleansing* yang dilakukan di DIY dengan menggunakan aplikasi dinilai sudah cukup baik. Bahkan, model *cleansing* di DIY bisa menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

"Akan direplikasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatra Utara, yang merupakan 52 persen dari DTKS," ujarnya.

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005